

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astuti, Warsono, A. R. (2020). *Collaborative governance* dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative governance* Konsep dan aplikasi. Sleman: CV Budi Utama.
- Islamy, La Ode Syaiful. (2018). *Collaborative governance* Konsep Dan Aplikasi. Deepublish.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konesp, Teori, dan Isu.
- Nabatchi, T., & Emerson, K. (2021). Implementation in collaboration governance. In *Handbook of Collaborative Public Management*. Edward Elgar Publishing.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). In *Alfabeta Bandung*.

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance* in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). *Collaborative governance* dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Cahyono, A. S., Dewi, R. S., Zauhar, S., Domai, T., & Siswidaynto. (2023). *Collaborative governance* Dalam Pelayanan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(3), 340–357.
- Deviyanti, K. E., & Harmawan, B. N. (2023). *Collaborative governance* Dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak. *Journal Publicuho*, 6(4), 1456–1464. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.288>
- Erika, P. H., Wulandari, S., & Musta'ana, M. (2023). *Collaborative governance* Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 333–352. <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i2.7688>
- Fajrianti, R. I., Muhammad, A. S., & Akhyari, E. (2022). *Collaborative governance* Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 1–9. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).8330](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).8330)
- Gordon, D., McKay, S., Marchildon, G., Sacha Bhatia, R., & Shaw, J. (2020). *Collaborative governance* for integrated care: Insights from a policy stakeholder dialogue. *International Journal of Integrated Care*, 20(1), 1–11. <https://doi.org/10.5334/ijic.4684>
- Gunawan, H., Widiastuti, W., Sarofah, R., & Lestari, V. (2024). *Collaborative*

- governance* in Prevention and Control of Sexual Abuse in Local Level. *Journal of Government Civil Society*, 8(October), 326–343.
- Haryono, D., & Heryanianto, S. (2023). *Collaborative governance In Child Protection in Tasikmalaya Regency*. <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-172-2>
- Heise, L., & Kotsadam, A. (2015). Cross-national and multilevel correlates of partner violence. *The Lancet Global Health*, 3(6), e332–e340.
- Kasita, I. D., & Sudarmo. (2023). *Collaborative governance* dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 119–135.
- Kesumaningsih, I., Aigistina, & Amalia, R. (2023). Collaborative Process for Preventing Violence Against Women and Children in Makassar City. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (JAKPP)* \, 9(2), 79–92.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). 9(2), 30–35.
- Prihatin, E., & Dwimawanti, I. H. (2020). *Collaborative governance* dalam mengatasi kenakalan remaja di Kabupaten Tegal. *Journal of Public Policy and ...* 9(2).
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27012%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/27012/23758>
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA SURABAYA*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10.
- Sukmawati, N., Suprastiyo, A., & Rupiarsieh. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO*. *JIAN: Jurnal Ilmiah Adminsitiasi Negara*, 6(2), 24–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.56071/jian.v6i2.654>
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>
- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). *Collaborative governance* Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2). <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i2.3780>

Peraturan Perundang-undangan

- Keputusan Wali Kota Nomor 463/1173 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Gerakan Pria Peduli Perempuan dan Anak Kota Semarang Periode 2023-2026
- Keputusan Wali Kota Nomor 463/534 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Seruni Kota Semarang
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Traficking Di Kota Semarang

Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dokumen Perencanaan dan Kinerja Pemerintah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2023 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2024 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Semarang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Semarang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2024
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2021- 2026

Internet

- Fauziyah, A., & Hardiyanto, S. (2024). *Karyawan Warung Bakso di Semarang Perkosa Rekan Kerjanya, Pelaku: Saya Nafsu*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/26/170321678/karyawan-warung-bakso-di-semarang-perkosa-rekan-kerjanya-pelaku-saya-nafsu>
- Komnas Perempuan. (2025). *CATAHU 2024: MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Komnasperempuan.Go.Id. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Laeis, Zuhdiar. (2023). *Kota Semarang raih lima penghargaan jelang akhir tahun*. AntaraNews Jawa Tengah, jateng.antaranews.com/berita/519138/kota-semarang-raih-lima-penghargaan-jelang-akhir-tahun.
- Mohan, M. (2021). *Perempuan di dunia banyak mengalami kekerasan fisik dan seksual: Satu dari tiga perempuan jadi korban, ungkap studi WHO*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56342562>
- Noven, C. (2024). *Pemkot Semarang Cegah Kekerasan Perempuan & Anak Lewat GARPU PERAK*. DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-7476818/pemkot-semarang-cegah-kekerasan-perempuan-anak-lewat-garpu-perak>
- Putri, R. A. (2023). *Sebulan 2 Anak di Semarang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ini Kata LBH Apik*. Jateng.Solopos.Com.
- Rahadi, F. (2023). *Santriwati 15 Tahun Jadi Korban Kekerasan Seksual, DP3A Semarang: Sedang Ditangani*. Rejogja.Republika.Co.Id.
- UN WOMEN. (2020). *COVID-19 and violence against women and girls: Addressing the shadow pandemic*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/06/policy-brief-covid-19-and-violence-against-women-and-girls-addressing-the-shadow-pandemic>
- United Nations Human Rights Council. (2019). *Report on gender-based violence and discrimination*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/OHCHRreport2019.pdf>
- Wolter, A. (2023, 9 November). *A novel approach to ending violence against women in Indonesia: The RESPECT framework*. WHO Indonesia. Diakses dari <https://www.who.int/indonesia/id/news/detail/09-11-2023-a-novel>

approach-to-ending-violence-against-women-in-indonesia--the-respect-
framework

World Bank. (2019). *The economic costs of gender-based violence*.
[https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-
against-women-and-girls](https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls)